

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025



**Disusun oleh :
Tim**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Prpgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan implementasi atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Dakam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih banyak keada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian dokumen renstra ini.

Akhir kata semoga Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 2

 B. Landasan Hukum..... 3

 C. Mkasud dan Tujuan 4

 D. Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 13

 A. Realisasi Program 13

 B. Faktor-faktor Penyebab 14

 C. Implikasi dan Tindakan..... 14

BAB III VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN19

 A. Visi 19

 A. Misi..... 19

 C. Tujuan 19

 D. Sasaran 23

 E. Program 33

 F. Kegiatan..... 33

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 19

 A. Uraian Program..... 19

 B. Uraian Kegiatan 23

 C. Uraian Sub Kegiatan..... 33

BAB IV PENUTUP 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang memuat perubahan anggaran berupa penambahan maupun pengurangan pada beberapa sub kegiatan. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan kondisi dan progress kegiatan, serta dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat bahwa Renja PD merupakan dokumen yang memuat penerjemahan Visi, Misi serta Kebijakan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah ke dalam Program dan Kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

- b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
- t. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan

kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perubahan perencanaan BPKAD Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencapai target kinerja, realisasi anggaran dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Bahan evaluasi pencapaian target kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II;
4. Mengakomodir perubahan-perubahan berupa penambahan maupun pengurangan anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja Perubahan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Dearah sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya pada Perubahan Tahun Anggaran 2025. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan 2025 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 718.675.211.213,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 309.363.493.094,00 atau 44,92% yang terdiri dari realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 47.781.532.705,00 (41,58%), realisasi belanja Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 274.234.900.646,00 (47,83%), dan realisasi belanja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar Rp. 267.613.309,00 (32,26%).

Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, 48 sub kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 46,64% dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 adalah 41,73% Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan yang belum direalisasi yaitu pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (tahap proses survey), pemeliharaan gedung dan bangunan yang masih dalam tahap penyusunan design;
2. Realisasi kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 47,71%. Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang belum direalisasi karena jadwal pelaksanaan kegiatan ada di triwulan III dan IV seperti sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS serta perubahannya, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan

perubahannya, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan, serta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Realisasi kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 32,26%. Hal ini dikarenakan ada 4 sub kegiatan yang belum ada outputnya meskipun secara serapan anggaran sudah ada realisasi, namun outputnya belum tercapai yaitu sub kegiatan penyusunan standar harga, Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang standar harga, standar kebutuhan Barang Milik daerah dan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melalui proses FGD (*Forum Group Discussion*) dengan pihak-pihak terkait dan sekarang masih dalam tahap harmonisasi dan evaluasi dengan Kemenkumham. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Sedangkan tujuan dari evaluasi peraturan daerah adalah untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur.

Berikut Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I yang disajikan pada Tabel 2.1.

TABEL
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II		
									Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Renja SKPD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8
											(7/6)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5	02				Keuangan						
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,0	85,13	84,4	-	0,00%
						Nilai Reformasi Birokrasi	60	75	75	-	0,00%
						% Realisasi Anggaran Perangkat daerah	95%	86,58%	95%	-	0,00%
						Indeks Profesionalitas ASN	83	80	83	-	0,00%
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	57,50%	57,50%
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	40,00%
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	50%	50,00%
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 org/bulan	50 org/bulan	50 org/bulan	50 org/bulan	50,00%
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	27,78%	27,78%
5	02	01	2,05		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	2 paket	2 paket	2 paket	-	0,00%
5	02	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	180 orang	180 orang	180 orang	100 orang	55,56%

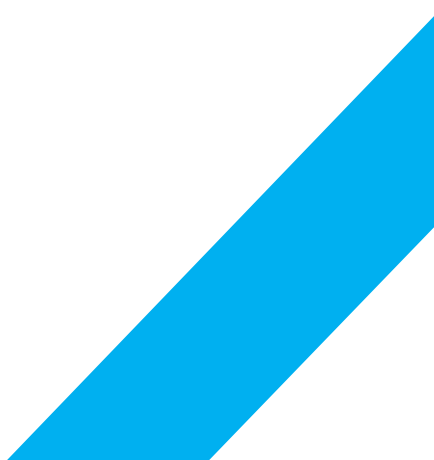
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	60,42%	60,42%
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	50,00%
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2 paket	2 paket	3 paket	4 paket	133,33%
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	6 paket	50,00%
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	50,00%
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	26 dokumen	50,00%
5	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	50,00%
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	01			Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	0%	0,00%
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	0,00%
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	86 Laporan	86 Laporan	72 laporan	36 laporan	50,00%

5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	28,09%	28,09%
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	5 unit	14,29%
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0,00%
5	02	01	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	14 unit	70,00%
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	100%	100%	95%	34,20%	34,20%
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	100%	100%	95%	6,69%	6,69%
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	-	0,00%
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	-	0,00%
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	98 dokumen	98 dokumen	98 dokumen	-	0,00%
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	98 dokumen	98 dokumen	98 dokumen	49 dokumen	50,00%
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	16 dokumen	3,56%
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	-	0,00%
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun	49 dokumen	49 dokumen	49 dokumen	-	0,00%
5	02	02	2,01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	-	0,00%

5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	31,75%	31,75%
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	576 dokumen	576 dokumen	576 dokumen	288 dokumen	50,00%
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	25,00%
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	300 orang	300 orang	300 orang	6 orang	2,00%
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	100%	100%	48,35%	48,35%
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	300 dokumen	50,00%
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	9 Laporan	60,00%
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	225 dokumen	225 dokumen	225 dokumen	200 dokumen	88,89%

5	02	02	2,03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	42,86%
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	100 orang	100 orang	100 orang	-	0,00%
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	95%	27,58%	27,58%
						Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	-
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	95%	27,58%	27,58%
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-	0,00%
5	02	03	2,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	2 dokumen	-	0,00%
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5 dokumen	-	0,00%

5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00%
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 laporan	500 laporan	500 laporan	22 Laporan	4,40%
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00%
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	71,43%
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	-	-	576 Laporan	288 Laporan	50,00%
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	96 orang	96 orang	96 orang	-	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja											40,16



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto, tugas BPKAD adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Adapun fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yaitu pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan serta pertanggungjawabannya. Pelayanan lain yang diberikan adalah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diperuntukkan bagi para pengelola keuangan mulai dari Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) hingga bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan beserta bendahara pembantu. Sedangkan pelayanan dalam bidang pengelolaan asset adalah pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan asset serta pembinaan pengelolaan asset daerah bagi penyusun barang inventaris perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran atau target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya yaitu hasil Opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP), hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dapat disajikan secara akuntabel, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.2 (T.C-30) berikut:

TABEL 2.2
(T.C-30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2025	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

- a. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Karakteristik dari isu strategi adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan/keorganisasian dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan, maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto:

- 1) Implementasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan, Pelaporan;
- 2) Peran Pengurus barang pengguna dalam penatausahaan BMD;
- 3) Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah;

- c. Dampak

- Implementasi aplikasi SIPD sampai dengan saat ini masih menyentuh perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Untuk akuntansi dan pelaporan pada aplikasi SIPD masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini menjadi sebab adanya dual aplikasi dalam pengelolaan keuangan yaitu SIPD dan FMIS yang digunakan sebagai aplikasi pendukung SIPD selama SIPD belum dapat digunakan secara optimal;
- Dalam hal pengelolaan asset daerah, masih banyak asset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dokumen pendukung perolehan barang baik dari hasil pengadaan maupun belanja barang atau perolehan lain tidak seluruhnya dilaporkan kepada pengurus barang. Hal ini mengakibatkan penatausahaan barang milik daerah menjadi terhambat sehingga nantinya bisa berdampak pada laporan keuangan;
- Masih terdapat asset Pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa serta pencatatan asset menjadi tidak rasional karena dalam tertib

- peraturan pengelolaan asset mensyaratkan adanya sertifikat tanah untuk tiap asset tanah yang dicatat dalam buku inventaris pemda.
- d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto

Tantangan yang dihadapi adalah:

- Pengelolaan asset yang belum optimal,
- Belum optimalnya aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan terutama pelaporan keuangan

Peluang:

- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal;
- Koordinasi yang baik dengan propinsi dan pusat;
- Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

- e. Rekomendasi

Rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan
- Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset;
- Koordinasi dengan kantor Pertanahan dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah pemda
- Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

2.4. Reviu Terhadap Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam tabel 2.3 berikut ini dapat dilihat adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan.

Tabel 2,3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
REVIU TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	RKPD PERUBAHAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEUANGAN									692.764.979.397
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80	129.651.045.847	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80	129.651.045.847
			Nilai Reformasi Birokrasi	75,00				Nilai Reformasi Birokrasi	75,00	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	
			Indeks Profesionalitas ASN	83				Indeks Profesionalitas ASN	83	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7.500.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	7.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	7.500.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	35.212.425.975	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	35.212.425.975
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	35.212.425.975,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	35.212.425.975,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	684.884.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	684.884.000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	100.000.000,00	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	100.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	180 Orang	584.884.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	180 Orang	584.884.000,00

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1.013.802.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1.013.802.000
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	244.762.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	244.762.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	130.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	130.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125.000.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	30.000.000,00
	Penyediaan bahan/material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	115.000.000,00	Penyediaan Bahan / Material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	115.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	120.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	120.000.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	234.040.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	234.040.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	92.169.683.872	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	92.169.683.872
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	92.020.183.872,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	92.020.183.872,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	149.500.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	149.500.000,00

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	555.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	555.250.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	269.000.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	269.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	86.250.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	86.250.000,00
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	558.604.605.550	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	558.604.605.550
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.478.710.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.478.710.000
	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	156.970.000,00	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	156.970.000,00
	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	150.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	301.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	301.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	65.770.000,00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	65.770.000,00
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	332.711.000,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	332.711.000,00
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	312.259.000,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	312.259.000,00
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	49 Dokumen	35.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	49 Dokumen	35.000.000,00
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	125.000.000,00	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	125.000.000,00

2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.190.405.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.190.405.000
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	350.385.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	350.385.000,00
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	200.250.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	200.250.000,00
	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	118.970.000,00	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	118.970.000,00
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	520.800.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	520.800.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	434.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	434.500.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	100.000.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	100.000.000,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	39.500.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	39.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniaharan Pertanggungjawaban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniaharan	225 Dokumen	145.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniaharan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniaharan	225 Dokumen	145.000.000,00

	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	555.500.990.550	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	555.500.990.550
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491.985.528.318	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491.985.528.318
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	25.563.066.554	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	25.563.066.554
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	37.952.395.678	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	37.952.395.678
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4.509.328.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4.509.328.000
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi				Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4.509.328.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4.509.328.000
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	1.008.821.000,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	1.008.821.000,00
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69.400.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69.400.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	187.879.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	187.879.000,00

	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	189.100.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	189.100.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	589.324.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	589.324.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	1.590.720.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	1.590.720.000,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	241.035.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	241.035.000,00
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	392.369.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	392.369.000,00
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	60.360.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	60.360.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	180.320.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	180.320.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada Renstra 2025-2029. Disamping itu peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun sampai dengan saat ini tidak ada usulan program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dari masyarakat, LSM maupun perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Bagi Pemerintah Pusat, RKP menjadi acuan oleh K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi Pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Berdasarkan tema RKP tahun 2025 tersebut, maka ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
4. revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 selaras dengan Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Strategi yang ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal,

konsistensi penguatan *spending better* untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Dari sisi pendapatan negara, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Sementara kebijakan belanja negara, diarahkan untuk menghasilkan *output/outcome* yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah selaku unsur penunjang pemerintah dalam hal keuangan juga turut mendorong penguatan *spending better* dalam pelaksanaan APBD, yang bermakna kepada kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel dalam hal ini yaitu penghematan belanja, penguatan belanja modal termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan social dan hibah serta penguatan kualitas transfer ke desa dalam rangka mewujudkan Pembangunan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

a. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai misi ke-1 Bupati yaitu **“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat”** maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi, misi dan merupakan hal yang akan dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan strategis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dengan indicator tujuan adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan indicator Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan asset daerah yang baik.

b. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang bersifat top-down harus didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Indikator sasaran BPKAD yang tertuang dalam RPJMD adalah opini BPK terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Mojokerto dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mempertahankan opini tersebut, pada Perubahan APBD tahun 2025, BPKAD telah menetapkan 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 48 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - (b) Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (f) Penyediaan Bahan / Material

- (g) Fasilitas Kunjungan Tamu
- (h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - (c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - (a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - (b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - (c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA – SKPD
 - (d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD
 - (e) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - (f) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - (g) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - (h) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - (a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - (b) Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya
 - (c) Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - (d) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota

- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - (a) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban
 - (b) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - (c) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota
 - (d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - (e) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - (b) Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak
 - (c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (a) Penyusunan Standar Harga
 - (b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - (c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - (d) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (e) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - (f) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - (g) Penilaian Barang Milik Daerah
 - (h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - (i) Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah
 - (j) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada perubahan RKPD Pemerintah Daerah yang memuat program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan program perlu dukungan kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target wajar tanpa pengecualian (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2022 tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan rencana program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun 2025 sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut ini.

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PERUBAHANNYA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025					CATATAN PENTING
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (INDUK)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		OPINI BPK		812,471,499,541				
		% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		114,999,609,648	112,789,109,328	(2,210,500,320)	APBD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	SEKRETARIAT BPKAD	15,000,000	15,000,000	-	APBD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	SEKRETARIAT BPKAD	7,500,000	4,200,000	(3,300,000)	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT BPKAD	7,500,000	4,200,000	(3,300,000)	APBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	38,738,831,785	38,738,831,785	-	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	SEKRETARIAT BPKAD	38,738,831,785	39,114,631,785	375,800,000	APBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	400,000,000	400,000,000	-	APBD	
	Pengadaan dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	SEKRETARIAT BPKAD	-	-	-	APBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	SEKRETARIAT BPKAD	400,000,000	333,000,000	(67,000,000)	APBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	832,424,000.00	832,424,000.00	-	APBD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	15,000,000	125,000,000	110,000,000	APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	190,000,000	515,601,200	325,601,200	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	75,000,000	95,000,000	20,000,000	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	100,000,000	118,000,000	18,000,000	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	30,000,000	55,000,000	25,000,000	APBD	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	115,000,000	115,000,000	-	APBD	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	SEKRETARIAT BPKAD	150,000,000	210,000,000	60,000,000	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	SEKRETARIAT BPKAD	107,424,000	103,709,200	(3,714,800)	APBD	
	Pemantauan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip	SEKRETARIAT BPKAD	50,000,000	50,000,000	-	APBD	

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025					CATATAN PENTING
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (INDUK)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	-	-	-	APBD	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	-	-	-	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	74,597,103,863	74,597,103,863	-	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SEKRETARIAT BPKAD	74,447,603,863	70,793,645,083	(3,653,958,780)	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	149,500,000	149,500,000	-	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	416,250,000	416,250,000	-	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	SEKRETARIAT BPKAD	200,000,000	225,000,000	25,000,000	APBD	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	SEKRETARIAT BPKAD	130,000,000	621,372,060	491,372,060	APBD	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	SEKRETARIAT BPKAD	86,250,000	156,250,000	70,000,000	APBD	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP		695,288,330,693	638,232,886,243	(57,055,444,450)	APBD	
	2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	Bidang Anggaran	1,109,295,850	1,109,295,850	-	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	136,000,000	129,074,650	(6,925,350)	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	127,500,000	123,279,750	(4,220,250)	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	189,750,000	175,775,750	(13,974,250)	APBD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	42,500,000	60,000,000	17,500,000	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	259,025,000	252,592,000	(6,433,000)	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran	245,000,000	238,755,900	(6,244,100)	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun	Bidang Anggaran	-	-	-	APBD	

Kode	URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025					CATATAN PENTING
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (INDUK)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bidang Anggaran	109,520,850	106,265,850	(3,255,000)	APBD	
	2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	598,970,000	598,970,000	-	APBD	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	150,000,000	203,960,750	53,960,750	APBD	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	75,000,000	110,960,750	35,960,750	APBD	
	Koordinasi, Pelaksa naan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	73,970,000	88,563,000	14,593,000	APBD	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	300,000,000	418,500,000	118,500,000	APBD	
	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	400,750,000	400,750,000	-	APBD	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	85,000,000	105,000,000	20,000,000	APBD	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	38,250,000	38,250,000	-	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	150,000,000	150,000,000	-	APBD	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	42,500,000	42,500,000	-	APBD	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	85,000,000	85,000,000	-	APBD	
	2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SEKRETARIAT BPKAD	693,179,314,843	693,179,314,843	-	APBD	

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025					CATATAN PENTING
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (INDUK)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SEKRETARIAT BPKAD	609,880,306,000	551,462,629,000	(58,417,677,000)	APBD	
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	SEKRETARIAT BPKAD	14,984,212,558	14,984,212,558	-	APBD	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT BPKAD	68,314,796,285	69,457,566,285	1,142,770,000	APBD	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelolaan BMD	2,183,559,200	3,522,590,432	1,339,031,232	APBD	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelolaan BMD	2,183,559,200	2,183,559,200	-	APBD	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Bidang Pengelolaan BMD	536,829,000	1,027,629,000	490,800,000	APBD	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Bidang Pengelolaan BMD	69,400,000	101,450,000	32,050,000	APBD	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	163,283,000	187,653,000	24,370,000	APBD	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-	APBD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	256,819,000	391,949,000	135,130,000	APBD	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-	APBD	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	648,438,200	1,185,423,932	536,985,732	APBD	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-	APBD	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-	APBD	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	260,000,000	439,779,500	179,779,500	APBD	
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	80,360,000	72,790,000	(7,570,000)	APBD	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-	APBD	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Pengelolaan BMD	132,430,000	115,916,000	(16,514,000)	APBD	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Pengelolaan Keuangan yang baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto, 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004